

EKSISTENSI PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN MORALITAS BANGSA

Firdaus

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
DPK STAI Al-Furqan Makassar

Abstract:

At the level of values, education has a vital role as a driver of the individual and the community to achieve progressivity in all aspects of life. In addition, education can be a determinant, it is important for personal and social transformation process. And indeed it is the ideals of education that promote their empowerment. Education is an attempt to increase proficiency, skills, understanding and attitudes through learning and experience needed to allow humans to maintain and continue living and to achieve the goal of his life. Building a nation's character is a central issue and a national issue. There are three reasons that make the nation's character becomes important. First, the nation experienced a developmental stage that is affected by global life and is known as the era of the information which influence the social order. Secondly, in terms of mentality, Indonesia still needs to clean up its act. Third, the same information age, this nation entered the era of reform that brings a very drastic change.

Abstrak:

Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi determinan, penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang memasyarakatkan adanya pemberdayaan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menambah kecakapan, keterampilan, pengertian, dan sikap melalui belajar dan pengalaman yang diperlukan untuk memungkinkan manusia mempertahankan dan melangsungkan hidup serta untuk mencapai tujuan hidupnya. Membangun karakter bangsa merupakan isu sentral dan menjadi isu nasional. Ada 3 alasan yang menjadikan karakter bangsa menjadi penting. Pertama, Bangsa mengalami babak perkembangan yang dipengaruhi oleh kehidupan global dan dikenal dengan era informasi yang pengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat. Kedua, dari sisi mentalitas, bangsa Indonesia masih perlu membenahi diri. Ketiga, bersamaan era informasi bangsa ini juga memasuki era reformasi yang membawa perubahan yang sangat drastis.

Kata Kunci: Pendidikan, Moralitas

I. PENDAHULUAN

Salah satu misi mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan telah termuat dalam garis-garis Besar Haluan Negara yaitu mewujudkan sistem dan iklim pendidikan Nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serata mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas

manusia Indonesia. Di dalam GBHM sangat jelas terlihat mengamanahkan arah kebijakan dibidang pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan kenagari kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan wtak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan, memperdayakan lembaga pendidikan baik sekolah mau-

pun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam tataran ideal, pergeseran para dikma yang awal memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan yang sejalan dengan seirama dengan zaman. Menyikapi hal tersebut diatas, dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang pengelolaan pendidikan dalam pembinaan karakter bangsa.

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dalam upaya membangun karakter bangsa:

1. Apa dan bagaimanakah pengelolaan pendidikan tersebut?
2. Bagaimanakah cara membangun karakter bangsa?
3. Sejauhmanakah upaya pendidikan dalam membangun karakter bangsa?

II. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin pengelolaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Satu-satunya hal yang pasti dimasa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasi-an, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik.

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntutan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson bahwa: *"The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change"*. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat

menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan Menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Rusyan ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

- Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan.
- Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.
- Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil.
- Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.
- Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.
- Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan.

- Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan
- Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.
- Menyiapkan anggaran dan mengamanakan dana.
- Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Malayu S.P. Hasbuan mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit (spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen (departementalisasi dan mendelegasikan wewenang.

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar

seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.

Sutisna mengemukakan bahwa organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan, manakala dilakukan upaya: 1) Menyusun struktur kelembagaan, 2) Mengembangkan prosedur yang berlaku, 3) Menentukan persyaratan bagi instruktur dan karyawan yang diterima, 4) Membagi sumber daya instruktur dan karyawan yang ada dalam pekerjaan.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruktur kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilakukan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Dalam pembahasan fungsi pengarahan, aspek kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sehingga definisi fungsi pengarahan selalu dimulai dan dinilai cukup hanya dengan mendefinisikan kepemimpinan itu sendiri.

Menurut Kadarman kepemimpinan dapat diartikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan, proses atau fungsi yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain

untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai entitas terkecil sebuah komunitas ataupun hingga skala Negara, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Pemimpin juga harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam mencapai tujuannya, maka saat itu dapat dianalogikan bahwa ia telah berhasil menggerakkan organisasinya dalam arah yang sama tanpa paksaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan pada gilirannya bermuara pada pencapaian visi dan misi organisasi atau lembaga pendidikan yang dilihat dari mutu pembelajaran yang dicapai dengan sungguh-sungguh oleh semua personil lembaga pendidikan. Soetopo dan Soemanto menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Di dalam kepemimpinan pendidikan sebagaimana dijalankan pimpinan harus dilandasi konsep demokratisasi, spesialisasi tugas, pen-delegasian wewenang, profesionalitas dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan organisasi, tujuan individu dan tujuan pemimpinnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Sebagaimana yang dikutip Muhammad Ismail Yusanto, Mockler mendefinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem

umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervise yang harus diterapkan sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.
- b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.
- c. Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif.
- d. Pengawasan yang dilakukan secara periodik.

5. Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja

merupakan penjabaran tugas pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang disesuaikan dengan konsiderasi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

B. Membangun Moralitas Bangsa (*Character Building*)

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam yang melimpah ruah akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berkarakter.

Dari segi bahasa istilah membangun karakter terdiri dari dua kata yaitu membangun (*to build*) dan karakter (*character*). Membangun artinya memperbaiki, membina, mendirikan, dan mengadakan sesuatu. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.

Dengan demikian membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabiat, watak, kejiwaan, akhlak dan budi pekerti sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai ajaran islam dan pancasila sebagai falsafah Negara.

Membangun karakter bangsa merupakan isu sentral dan menjadi isu nasional. Terdapat tiga alasan yang menjadikan karakter bangsa menjadi penting. *Pertama*, Bangsa Indonesia telah mengalami babak perkembangan

yang dipengaruhi oleh kehidupan global dan dikenal dengan era informasi yang sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat. *Kedua*, dari sisi mentalitas, bangsa Indonesia masih perlu membenahi diri. *Ketiga*, bersamaan dengan erainformasi bangsa ini juga memasuki era reformasi. Era yang membawa perubahan yang sangat drastis pada atmosfer politik bangsa dengan kebebasan berpendapat yang jauh berbeda dengan era sebelumnya.

Usaha tersebut menjadi gambaran perlunya ketahanan bangsa untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang muncul di era globalisasi. Dan salah satu upaya adalah dengan membangun karakter bangsa khususnya para generasi muda penerus harapan bangsa.

Sesungguhnya pembentukan karakter banyak ditentukan oleh karakter individu-individu yang ada di dalamnya. karakteristik yang khas dari seseorang ini sering disebut kepribadian yaitu suatu keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi potensi-potensi fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang dialaminya.

Setiap orang memiliki karakter yang membedakan dirinya dengan yang lain dipengaruhi oleh factor *genotype* dan *fenotipe* yang saling berinteraksi terus menerus. Individu yang berkarakter adalah individu yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bertindak yang berlandaskan pada sikap dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karakter merupakan sesuai bagian dari diri manusia yang tidak bersifat turunan (diwariskan) melainkan harus dicari, ditemukan, dan ditempa sendiri karena sebenarnya.

Sudah melekat pada diri tiap manusia sejak dilahirkan dan menjadi bagian kolektif dari suatu masyarakat.

Character Building adalah sesuatu yang sangat mendasar dan dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia dan ibarat berlian, karakter manusia akan terus berkilau jika digali dan di asah.

Hellen Keller seorang tokoh legendaris Alabama mengatakan bahwa pembangunan karakter tidaklah mudah, tetapi harus melalui pengalaman-pengalaman batin yang penuh dengan percobaan dan pengorbanan yang menghasilkan visi, ambisi dan sukses.

Oleh karena itu, karakter manusia Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan kunci yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur.

C. Eksistensi Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa

Kenapa pendidikan yang kini tumbuh berkembang pesat, justru berefek samping melahirkan banyaknya koruptor dan teroris, walaupun tidak seluruh anak bangsa menjadi koruptor dan teroris, tetapi mereka para pelaku korupsi justru orang-orang yang umunya sudah menyandang berbagai title strata pendidikan. Apa yang salah dalam pendidikan kita? Dalam hal kasus-kasus yang menyangkut kriminalitas, kejahatan, pembunuhan, teroris, mereka adalah orang-orang yang telah menikmati pendidikan cukup. Timbul pertanyaan, lalu apa yang masih kurang bagi mereka dan bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan yang berlimpah ini? Perlu direnungkan masalah-masalah pokok tersebut diatas yang pada dasarnya bermuara pada kurangnya pendidikan karakter bangsa.

Kepentingan nasional Indonesia merupakan kepentingan bangsa dan Negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang di dalamnya mencakup usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu implementasinya apa? Rumusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu memiliki 2 (dua) arti penting yaitu membangun manusia Indonesia yang cerdas dan berbudaya. Pengertian cerdas harus dimaknai, bukan saja sebagai kemampuan dan kapasitas untuk menguasai ilmu pengetahuan, budaya serta kepribadian yang tangguh akan tetapi juga memiliki kecerdasan emosional yang dengan bahasa umum disebut sebagai ber-karakter.

Mulia atau berbudi luhur, ber-akhlak mulia. Sedangkan berbudaya memiliki makna sebagai kemampuan dan kapasitas untuk menangkap dan mengembangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang beradab dalam sikap dan tindakan berbangsa dan bernegara (karakter bangsa) dengan penuh tanggung jawab.

Kita harus sadar, bahwa pembentukan karakter dan watak atau kepribadian ini sangat penting, bahkan sangat mendesak dan mutlak adanya (tidak bisa ditawar-tawar lagi). Hal ini cukup beralasan. Mengapa mutlak diperlukan? Karena adanya krisis ekonomi dan moral yang terus berkelanjutan melanda bangsa dan Negara kita sampai saat ini belum ada solusi secara jelas dan tegas, lebih banyak berupa wacana yang seolah-olah bangsaini diajak dalam dunia mimpi. Tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu Pemerintah mengeluarkan pandangan, bahwa bangsa kita akan makmur, sejahtera nanti ditahun 2030. Sebuah mimpi panjang yang melenakan jika konsep pendidikan masih seperti ini.

Banyak kalangan masyarakat yang mempunyai pandangan terhadap istilah “kelatahan sosial” yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini memang terjadi dengan berbagai peristiwa, seperti tuntutan demokrasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa aturan, tuntutan otonomi sebagai kemandirian tanpa kerangka acuan yang mempersatukan seluruh komponen bangsa, hak asasi manusia yang terkadang mendahulukan hak pribadi daripada kewajiban sebagai bangsa. Pada akhirnya berkambang kea rah berlakunya hukum rimba yang memicu tumbuhnya pandangan sempit seperti kesukubangsaan (ethnicity) dan unsur SARA lainnya. Kerancuan ini menyebabkan masyarakat frustrasi dan cenderung meluapkan jati diri dan tanggung jawab tanpa kendali dalam bentuk “amuk massa atau amuk sosial”

Berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan, pendidikan nasional pada saat yang sama masih tetap memikul peran multidimensi. Berbeda dengan peran pendidikan pada Negara-negara maju, yang pada dasarnya lebih terbatas pada transfes ilmu pengetahuan, peranan pendidikan nasional di Indonesia memikul beban lebih berat. Pendidikan berperan bukan hanya merupakansarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi sebagai pembudayaan (enkulturisasi) yang tentu saja hal terpenting dan pembudayaan itu adalah pembentukan karakter dan watak bangsa (nation and character building), yang pada gilirannya sangat krusial, dalam bahasa lebih populer menuju rekonstruksi Negara dan bangsa yang lebih maju dan beradab. Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan smua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah,

masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu menyambung kembali hubungan dan educational networks yang mulai terputus tersebut.

Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih diberdayakan. Sebagaimana disarankan Philips, keluarga hendaknya kembali menjadi school of love, sekolah untuk kasih sayang (Philips, 2000) atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang (keluarga yang sakinan, mawaddah dan warrahmah).

Sedangkan pendidikan karakter melalui sekolah, tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur. Pemberian penghargaan (prizing) kepada yang berprestasi dan hukuman kepada yang melanggar, menumbuhkan (*cherishing*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mencegah (*discowaging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk. Selanjutnya menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*characterbase education*) dengan menerapkan ke dalam setiap pelajaran yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk mendidik karakter, seperti; pelajaran Agama, Sejarah, Moral Pancasila dan Kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Di samping itu tidak kalah pentingnya pendidikan dimasyarakat. Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap karakter dan watak seseorang. Lingkungan masya-

rakat luas sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai etika, estetika untuk pembentukan karakter. Menurut Qurais Shihab, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya terbatas pada hal yang sama.

Apabila kita cermati bersama, bahwa desain pendidikan yang mengacu pada pembebasan, penyadaran dan kreativitas sesungguhnya sejak masa kemerdekaan sudah digagas oleh para pendidik kita, seperti Ki Hajar Dewantara, K.H. Ahmad Dahlan, Prof. HA. Mukti Ali, Ki Hajar Dewantara misalnya, mengajarkan praktek pendidikan yang mengusung kompetensi/kodrat alam anak didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan “tuntunan” bukan “tontonan”. Sangat jelas cara mendidik seperti ini dikenal dengan pendekatan “among” yang lebih menyentuh langsung pada tataran etika, perilaku yang tidak terlepas dengan karakter atau watak seseorang. K.H. Ahmad Dahlan berusaha “mengadaptasi” pendidikan modern Barat sejauh untuk kemajuan Umat Islam, sedangkan Mukti Ali mendesain integrasi kurikulum dengan penambahan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun mengapa dunia pendidikan kita yang masih berkutut dengan problem internalnya, seperti penyakit dikotomi, profesionalitas pendidikannya, sistem pendidikan yang masih lemah, perilaku pendidikannya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, membangun karakter dan watak bangsa melalui

pendidikan mutlak diperlukan bahkan tidak bisa ditunda, mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat dengan meneladani para tokoh yang memang patut untuk dicontoh.

III. KESIMPULAN

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja merupakan penjabaran tugas pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang disesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

Membangun karakter bangsa merupakan isu sentral dan menjadi isu nasional. Terdapat tiga alasan yang menjadikan karakter bangsa menjadi penting. *Pertama*, Bangsa Indonesia telah mengalami babak perkembangan yang dipengaruhi oleh kehidupan global dan dikenal dengan era informasi yang sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat. *Kedua*, dari sisi mentalitas, bangsa Indonesia masih perlu membenahi diri. *Ketiga*, bersamaan dengan erainformasi bangsa ini juga memasuki era reformasi. Era yang membawa perubahan yang sangat drastic pada

atmosfer politik bangsa dengan kebebasan berpendapat yang jauh berbeda dengan era sebelumnya.

Usaha tersebut menjadi gambaran perlunya ketahanan bangsa untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang muncul di era globalisasi. Dan salah satu upaya adalah dengan membangun karakter bangsa khususnya para generasi muda penerus harapan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- David R. Fred, *Konsep Manajemen Strategi*, Edisi VII.(terjemahan) Jakarta, PT Indeks.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan S.P Malayu, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet II. Jakarta, PT Toko Gunung Agung.
- Ismail M. Yusanto. 2003 *Pengantar Manajemen Syariat*, Cet. II, Jakarta. Khairul Bayan.
- Johnson R.A. 1973. *The Theory and Management of System*, Tokyo, McGraw Hill Kogakusha.
- Kadarman, A.M.et.al. 1996 *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta, Gramedia.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan *Makalah Lembaga Pendidikan DDI dan Perwujudan Karakter Bangsa yang Berperadaban dalam era reformasi* (disampaikan pada penamatan terpadu DDI se-Kabupaten Maros, 12 Mei 2011)
- Rusyan A.Tabrani. 1992. *Manajemen Kependidikan*, Bandung, Media Pustaka.

Setiadi M. Elli et.al. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* Cet. 6, Jakarta : Kencana.

Soedarsono, Soemarno. 2006 *Hasrat Untuk Berubah "The Willingness*

to change" Cet. VI, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sutisna, Oteng. 1985. *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Angkasa.